

Pengaruh Faktor-Faktor *Theory Planned Of Behaviour (TPB)* Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat

Hurian Kamela^{a,*}

^a*Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia, melakamel@yahoo.com, Indonesia*

Abstract. There must be an awareness of the public regarding compliance in paying taxes. Tax is a state asset that is collected by the state for the common interest. The role of society in paying taxes must be accompanied by internal (within) the individual itself because there are still limited people who know that taxes are crucial. This study aims to link the effect of individual taxpayer compliance based on the "Theory of Planned Behavior" because this theory is a theory that can measure the internal thinking of taxpayers. This study uses primary data collected through a questionnaire using linear regression analysis. The sample used is a sample (people) of 100 taxpayers using measurements random sampling (people who are in the tax office) 1 month (November 2015). The study results found that the variable attitudes toward behavior, subjective norms and perceptual behavior control were positive influences. That explains a need for awareness of taxpayer compliance to run appropriately, and income from tax payments can increase.

Keywords: Tax, Compliance, Factors, Behavior

*Corresponding author. E-mail: melakamel@yahoo.com

Pendahuluan

Pengumpulan pajak merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pemerintah untuk mewujudkan kegiatan dan perkembangan negara, hal ini memberikan peran utama bahwa pajak bukan sekedar uang yang dikumpulkan saja demi kepentingan negara, akan tetapi akan diolah dan dikelola ulang demi kepentingan rakyat banyak.

Di Indonesia, aturan mengenai Pajak sudah tercantum di Undang-Undang, karena komponen paling penting dalam pembayarannya adalah salah satunya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP). Wajib pajak orang. Tarjo & Kusumawati (2006) menjelaskan bahwa pengukuran mengenai lemahnya kepatuhan pajaknya terlihat dari sedikitnya pelaksanaan target tiap tahun dari penerimaan pajak khususnya mengenai penerapan target yang tidak tercapai. Hal ini menjelaskan bahwa perlunya peningkatan mengenai penerimaan pajak, sehingga dapat terkendali tiap tahun, bukan sebatas dalam target saja.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan fokus sektor publik, khususnya dalam pelaksanaan *Sustainability Development Goals (SDGs)*, seperti halnya negara lain yang sudah mengembangkan peran keberlanjutan di sektor publik secara efektif, salah satunya berkaitan dengan *tax* (pajak).

Peningkatan peran masyarakat serta perkembangan negara dalam pelaksanaan pembayaran pajak dapat diukur melalui "*Theory Of Planned Behaviour*". Studi mengenai kepatuhan dalam membayar pajak ini telah banyak di teliti dalam lingkungan sektor publik di Indonesia dan negara lain, tetapi yang membedakannya adalah persebaran sampel yang tidak sama, karena perbedaan lokasi, tempat dan pengukuran sampel. Hal ini dijelaskan oleh Kirchler (2007) mengenai perbedaan sistem pengukuran karena masing-masing tempat seperti negara serta pribadi (individu) mempunyai peran penting dalam menentukan gambaran sebenarnya mengenai pembayaran pajak yang efektif. Penelitian Taing & Chang (2020) mengenai pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak di Kamboja memberikan hasil bahwa pembayar pajak di Kamboja sebagai pihak yang patuh terhadap pembayaran pajak. Studi lain di Indonesia oleh Sutrisno et al. (2018) mengenai di Sulawesi mencerminkan keberagaman dalam pelaksanaan pembayaran pajak, ada yang bersifat negatif dan positif.

Hal ini sangat berkaitan dengan Pemerintah sehubungan dengan pihak yang berkaitan dengan seberapa banyak SPT yang diterima serta terdaftar, hal ini terlampir pada tabel 1.

Tabel 1
Tabel Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Khusus (Wajib Pajak Orang Pribadi) Tahun 2014-2015

Wajib Pajak	2014	2015
Jumlah SPT diterima	5,814 juta	6,1290 juta
Jumlah SPT terdaftar	14,6052 juta	15,5328 juta

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang, 2020

Tahun 2014 merupakan salah satu pelaksanaan kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat terlihat dari jumlah wajib pajak yaitu 5,814 juta dan meningkat menjadi 6,1290 juta, kenaikan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2015 dengan meningkatnya jumlah SPT diterima dan terdaftar. Hal ini terbukti bahwa peran pajak sangat penting karena 70% total penerimaan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk dapat membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini menjelaskan bahwa pajak yang dipungut dari pemerintah akan dikembalikan lagi ke masyarakat, sesuai dengan pelaksanaan peran pajak di Indonesia. Berdasarkan hal inilah paper ini akan meneliti 'Pengaruh Faktor-Faktor *Theory Planned Of Behaviour (TPB)* Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Case Study KPP Palembang Ilir Barat'' dengan menekankan faktor-faktor yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi serta tambahan variabel niat terhadap *Behaviour*.

Literature Review

Penelitian mengenai *Theory Of Planned Behaviour*, mengenai kepatuhan pajak dan wajib pajak dapat dikaitkan dari *cross-country* tiap negara karena memang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Ramayah et al. (2009) di Malaysia mengenai TPB dan kepatuhan memberikan bukti bahwa TPB secara positif berlaku di negara Malaysia dalam kaitannya berdasarkan niat (intention) dalam pelaksanaan pajak secara e-Filing. Hasil ini membuktikan bahwa saat pembayaran pajak, apakah benar-benar niat mereka dalam membayar pajak dengan e-filing sehingga pembayaran pajak dapat terselesaikan.

Penelitian di Uganda oleh Kiconco et al. (2019) menjelaskan bahwa dalam kepatuhan pajak berhubungan dengan action berkaitan dengan kepatuhan pajak di Uganda berdasarkan Wajib Pajak yang berasal dari *Small-Medium-Enterprise* (UKM in Indonesia), bahwa peran pembayaran pajak sebagai peningkatan dalam perkembangan negara.

Penelitian lain oleh Taing & Chang (2020) di Kamboja juga menjelaskan ada 3 komponen yang berkaitan dengan kepatuhan pajak yaitu *tax morale*, *tax fairness* serta *tax complexity* yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Kamboja, namun peran pemerintah seperti informasi mengenai pajak tidak berpengaruh terhadap niat masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Hung & Chang (2006) di Taiwan juga meneliti mengenai pembayaran pajak berdasarkan *e-government* di Taiwan dipengaruhi oleh *Theory Of Planned Behavior (TPB)*, sebesar 72% dalam perilaku (*behaviour*), serta faktor lain seperti manfaat, risiko serta fasilitas berpengaruh dalam perilaku. Penelitian terbaru oleh Hamdah et al. (2020) di Garut (Indonesia) Kantor Pajak menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dalam penyerahan SPT berbeda dengan jumlah SPT yang diterima oleh Kantor Pajak, hal ini mencerminkan bahwa terjadinya perbedaan pandangan visi tiap manusia. Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour (TPB)* hal ini disebabkan ada 3 pertimbangan: keyakinan perilaku mengenai hasilnya, harapan normatif, serta bagaimana motivasi individu untuk dapat patuh dengan aturan. Hal ini terbukti dari laporan yang diterima oleh Kantor Pajak berbeda dengan jumlah pihak yang terdaftar.

Pajak

Pajak merupakan salah satu komponen dalam pendapatan pemerintah. Masih rendahnya pelaksanaan kepatuhan pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2015 berdasarkan rasio pajak. Ada perbedaan pengukuran antara penerimaan pajak di Indonesia dengan negara-negara yang berbasis OECD, karena pengukuran rasio pajak dilihat berdasarkan pajak pusat, pajak dari daerah, serta pengukuran sumber daya alam, sedangkan pengukuran rasio pajak di Indonesia hanya terbatas pada Produk Domestik Regional Bruto (PDB) dan

penerimaan pajak, sehingga Indonesia lebih sedikit jumlahnya dibanding negara lain (Widodo & Austin, 2015). Pajak sebagai pendapatan dan penghasilan negara memegang peranan penting untuk terwujudnya *sustainability* (keberlanjutan) dalam pencapaian tujuan negara.

Compliance (Kepatuhan)

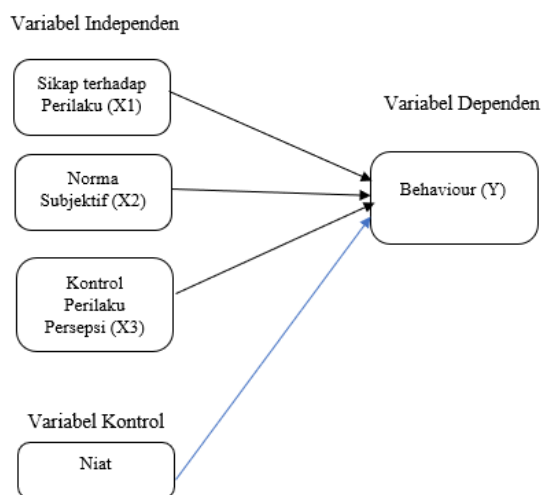
Aturan pemerintah di tahun 2012 Nomor 74 /PMK.03/ 2012 mengenai kriteria pajak khusus (tertentu) untuk Wajib Pajak Badan dan Orang harus memiliki kriteria khusus yaitu (1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan harus tepat waktu dan sesuai jadwal, (2) tidak mempunyai permasalahan mengenai pajak, seperti adanya tunggakan yang belum lunas, kecuali ada telah terbit izin dalam mengangsur angsuran, (3) Untuk WP badan harus beropini Wajar Tanpa Pengecualian dengan periode selama 3 tahun, (4) tidak pernah berhubungan dengan pidana dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori yang banyak digunakan dalam pengukuran sektor pemerintahan. Teori ini ditemukan oleh Icek Ajzen (2006) sebagai pengembangan teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action (TRA)* mengenai perilaku-perilaku individu. *Theory of planned behavior (TPB)* menjelaskan ada 4 garis besar komponen yaitu (1) Kepercayaan-kepercayaan perilaku, hal ini disebut sikap (*attitude*), (2) Kepercayaan normatif (*normative belief*) yang berhubungan dengan harapan-harapan dibandingkan pihak lain, (3) kepercayaan kontrol (*control beliefs*) mengenai masalah atau rintangan yang terjadi dalam terwujudnya tindakan, (4) *perceived behavioral control*, berupa control atas tindakan yang dipilih. Pada penelitian ini digunakan 3 faktor dalam TPB yaitu poin 1, 2, dan poin 4, karena poin-poin ini mewakili dalam pengukuran tindakan.

Ajzen (2006) menjelaskan bahwa peran *perceived behavioral control* berdasarkan perilaku yang melibatkan pengalaman sebelumnya mengenai individu pada perilaku perilaku, lalu di observasi dan dibandingkan dengan kejadian yang ada.

Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini ada 3 variabel, yaitu variable, pertama adalah Sikap terhadap Perilaku (X1), Norma Subjektif (X2), Kontrol Perilaku Persepsi (X3), serta ditambahkan variabel kontrol yaitu niat (X4). Pengukuran Variabel Dependen menggunakan Behaviour (Y).

Sikap terhadap perilaku berpengaruh terhadap Behaviour kepatuhan membayar pajak

Penelitian Langham (2012) di Australia meneliti mengenai *attitude* terhadap kepatuhan pajak bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak, banyak aspek lain dari masyarakat untuk menyadari posisinya sebagai pembayar pajak yang patuh. Wajib Pajak seharusnya mempunyai pemikiran dan moral dalam patuh membayar pajak. Hal ini disebabkan motivasi intrinsik bahwa adanya kesadaran bahwa membayar pajak adalah wajib (Cummins et al., 2009).

Penelitian Richardson (2006) memberikan gambaran yang berbeda mengenai 45 negara tentang adanya penggelapan pajak serta menggambarkan adanya pengaruh perilaku masyarakat karena adanya penggelapan pajak sehingga kepatuhan pajak dapat menurun. Penelitian lain oleh Alabede et al. (2011) membahas bahwa moral kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian lainnya yaitu Devos (2013) dengan membandingkan

banyaknya metode mengenai kepatuhan pajak di Australia menjelaskan bahwa adanya pengaruh sikap terhadap perilaku (*Behaviour*) individu pembayar pajak.

H1: Sikap terhadap perilaku berpengaruh terhadap *Behaviour* kepatuhan membayar pajak.

Norma subjektif berpengaruh terhadap Behaviour kepatuhan membayar pajak

Norma subjektif (*subjective norm*) adalah bagaimana perkembangan pengaruh dari orang-orang sekitar yang dilihat dari penilaian (persepsi) dalam berperilaku, seperti kolega, teman, dan keluarga (Ajzen, 2006). Penelitian Taing & Chang (2020) membuktikan norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, namun ada perbedaan hasil bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak signifikan. Hasil ini menjelaskan bahwa perlunya norma sosial kepada pemerintah, supaya pemerintah harus dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan kehendak masyarakat. Penelitian lain oleh Taing & Chang (2020) di Kamboja membuktikan bahwa norma-norma wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku dalam membayar pajak, hal ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai kepatuhan yang dimiliki oleh masing-masing individu tidaklah sama, sehingga :

H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap *Behaviour* kepatuhan membayar pajak.

Kontrol perilaku persepsi berpengaruh terhadap Behaviour kepatuhan membayar pajak

Ajzen (2006) menjelaskan bahwa kontrol keperilakuan berpengaruh terhadap niat karena akan digambarkan persepsinya oleh individu itu sendiri. Ajzen (2006) menjelaskan bahwa PBC atau Kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu itu sendiri menggambarkan pengalaman terhadap kehidupan, hal ini termasuk masalah yang dihadapi misalnya uang, kemampuan dan waktu. Dalam penelitian mengenai kepatuhan pajak, Langham (2012) menjelaskan adanya kekuatan otoritas, pajak, informasi serta kesadaran mengenai sebagai permasalahan dalam melakukan kontrol terhadap perilaku wajib pajak. Penelitian Langham (2012) di Australia menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh PBC terhadap kepatuhan wajib pajak di Australia, ukuran PBC tidak signifikan pada nilai 95% $t = 1,092 (-,001, 0,002)$.

Hasil ini memberikan penelitian yang berbeda di Indonesia oleh Mustikasari (2008) bahwa adanya PBC berpengaruh terhadap niat dan perilaku. Hal ini dapat terjadi 2 arah, yaitu positif dan negatif, sehingga:

H3: Kontrol perilaku persepsi berpengaruh terhadap *Behaviour* kepatuhan membayar pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan *case study* menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Tahun yang digunakan dalam kuisioner adalah 1 bulan yaitu November tahun 2015. Analisis menggunakan analisis regresi.

Sumber data

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari kuisioner berlokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Observasi dan Sampel

Keseluruhan observasi adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Palembang Ilir Barat. Sampel diukur berdasarkan minimal dari pengukuran Slovin. Jumlah minimum sampel menurut Rumus Slovin.

$$n = N / (1 + N e^2) = 9267 / (1 + 100 \times 0,02^2) = 91,7521 = 91 \text{ orang}$$

Tetapi sampel ditambahkan lagi menjadi 100 orang karena lebih mudah untuk diukur. Data tambahan yang diperoleh adalah jumlah penerimaan dan jumlah terdaftar KPP Pratama Palembang Ilir Barat serta perkembangan wajib pajak orang pribadi yang terlampir dari tahun 2009-2014 di tabel 2.

Tabel 2

Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Periode 2009 S/D 2014 KPP Pratama Palembang Ilir Barat (Total Wajib Pajak Orang Pribadi)

Tahun	Jumlah WP Orang Pribadi
<2009	<36.594
2009	18.812
2010	14.407
2011	10.945
2012	8.865
2013	8.618
2014	9.276
Total	107.515

Sumber: Data Primer, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Berikut perasamam regresi linear bergandanya :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y =Behaviour, α = konstanta, β = koefisien regresi
 X1 = Sikap terhadap Perilaku, X2 = Norma Subjektif,
 X3 = Kontrol Perilaku Persepsi, X4 = Niat

Pembahasan

Gambaran Umum Responden

Gambaran secara umum responden dapat terlihat pada demografi responden. Demografi responden adalah pekerjaan, jumlah gaji (pertahun) dan jenis kelamin. Berdasarkan Tabel 3 maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu berdasarkan pekerjaan adalah terbanyak yaitu swasta (59%) dan PNS (41%). Mengenai jenis kelamin (*Gender*) yang mengisi kuisioner ini adalah pria dan wanita. Secara garis besar inilah gambaran umum dari responden penelitian, lalu responden akan diberi kuesioner untuk diisi.

Tabel 3
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Persentas e
Pekerjaan	PNS	41	41%
	Swasta	59	59%
Gaji	<30.000.000	38	38%
	30.000.000-50.000.000	48	48%
	>50.000.000	16	16%
Gender	Pria	52	52%
	Wanita	49	49%

Sumber: Data Primer- Kuisioner

Pada poin jumlah gaji (Pertahun) yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 30.000.000 adalah sebanyak 38 orang (38%), rentang pendapatan Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 sebanyak 46 orang (46%), dan lebih dari Rp 50.000.000 hanya 16 orang (16%).

Untuk data terakhir yaitu gender terdiri atas 2, yaitu pria dan wanita. Pria (52 orang) dan Wanita (49 orang), dengan persentase 52% dan 49%.

Dari Tabel 3 diatas dapat juga diolah menggunakan program SPSS agar terlihat hasil pengelompokkan yang lebih rinci seperti berikut ini:

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Data Deskriptif	Min	Max	Mean	Std.Dev	N
Predicted Value	24,12	26,01	23,91	1,042	100
Std. Predicted Value	-1,900	2,545	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,252	,986	,480	,160	100
Adjusted Predicted Value	22,10	26,07	25,24	1,049	100
Std. Residual	-4,458	5,265	,000	2,198	100
Deleted Residual	-1,860	2,684	,000	,970	100
Std. Deleted Residual	-2,046	2,597	-,001	1,084	100
Std. Residual	-4,891	6,202	-,020	2,409	100
Deleted Residual	-2,080	2,879	,000	1,027	100
Std. Deleted Residual	,172	17,25	3,898	3,358	100
Deleted Residual	,000	,120	,015	,024	100
Std. Deleted Residual	,04	,172	,043	,042	100

Sumber: Data Primer- Kuisioner

Transformasi Data Ordinal ke Interval

Tabel 5
Data Ordinal ke Interval

Skor Skala Ordinal	Frekuensi	Persentase
1	4	0.04
2	7	0.07
3	14	0.14
4	21	0.21
5	54	0.54
Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer- Diolah

Pada tabel 5 data ordinal berdasarkan jumlah responden yaitu sebanyak 100 orang yang memilih sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Jumlah yang sangat setuju adalah > 50% yaitu 54, disusul dengan yang menjawab setuju sebanyak 21, dan sisanya yang netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, yaitu 14, 7, 4.

Tabel 6
Tabel Nilai dalam Bentuk Data Interval

Skor Skala Ordinal	Nilai Dalam Bentuk Interval
4	1
7	1.2486
14	2.4889
21	3.5745
54	3.9103

Sumber: Data Primer- Diolah

Tabel 6 menggambarkan interval frekuensi yang paling tinggi adalah skor ordinal 5 yaitu 3.9103 dan dan terkecil adalah skala skor ordinal 1 yaitu 1.

Tabel 7
Transformasi Data Ordinal ke Interval

Skor Skala Ordinal	Freq	prop	prop_kum	z_val	z2_val	interval
1	4	0.04	0.21	-0.04	0.0016	1
2	7	0.07	0.24	0.17	0.0289	1.2486
3	14	0.14	0.4	0.22	0.0484	2.4889
4	21	0.21	0.56	0.3	0.09	3.5745
5	54	0.54	0.25			3.9103
Jumlah	100					

Sumber: Data Primer- Diolah

Tabel 8
T-paired

Skor Skala Ordinal	Freq
Korelasi Variabel (r Pearson)	0.989555
T Paired	0.285972

Sumber: Data Primer- Diolah

Tabel 8 menjelaskan transformasi variabel (r Pearson) adalah baik, karena mendekati angka 1, yaitu sebesar 0.989555.

Uji Validitas dan Reabilitas

Tabel 9
Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.807	100

Sumber: Data Primer- Diolah

Tabel 10
Ringkasan Hasil Perhitungan Reabilitas dan Validitas

Variabel	Indikator	Cronbach's Alpha	Corrected Item Total Correlation
Sikap Terhadap Perilaku (X1)	Pertanyaan 1	0.870	0.384
	Pertanyaan 2	0.805	0.452
	Pertanyaan 3	0.800	0.243
	Pertanyaan 4	0.803	0.240
	Pertanyaan 5	0.805	0.198
	Pertanyaan 6	0.804	0.440
Norma Subjektif (X2)	Pertanyaan 7	0.808	0.434
	Pertanyaan 8	0.803	0.552
	Pertanyaan 9	0.805	0.508
	Pertanyaan 10	0.805	0.482
	Pertanyaan 11	0.809	0.785
	Pertanyaan 12	0.807	0.962
	Pertanyaan 13	0.800	0.570
Kontrol Perilaku Persepsi (X3)	Pertanyaan 14	0.809	0.444
	Pertanyaan 15	0.801	0.423
	Pertanyaan 16	0.810	0.385
	Pertanyaan 17	0.801	0.324
	Pertanyaan 18	0.800	0.379
	Pertanyaan 19	0.807	0.493
	Pertanyaan 20	0.811	0.424
Niat (X4)	Pertanyaan 21	0.807	0.498

Variabel	Indikator	Cronbach's Alpha	Corrected Item Total Correlation
	Pertanyaan 22	0.809	0.422
	Pertanyaan 23	0.811	0.470
	Pertanyaan 24	0.805	0.632
	Pertanyaan 25	0.808	0.247
	Pertanyaan 26	0.804	0.258
	Pertanyaan 27	0.806	0.711
Perilaku- Behaviour (Y)	Pertanyaan 28	0.800	0.852
	Pertanyaan 29	0.806	0.956
	Pertanyaan 30	0.804	0.741
	Pertanyaan 31	0.811	0.980
	Pertanyaan 32	0.808	0.632

Sumber: Data Primer- Kuisioner

Tabel 10 menjelaskan bahwa semua item pertanyaan nilai Cronbach Alpha >0,6 berarti semua item pertanyaan bersifat reliabel sehingga dapat diteliti.

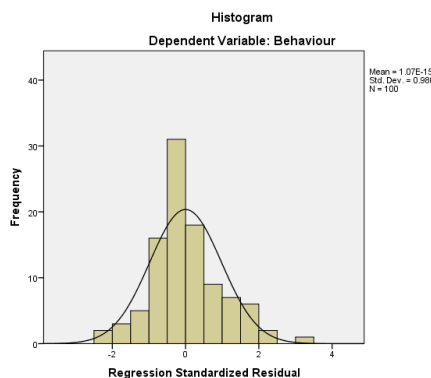
Uji Asumsi Klasik

Tabel 11
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

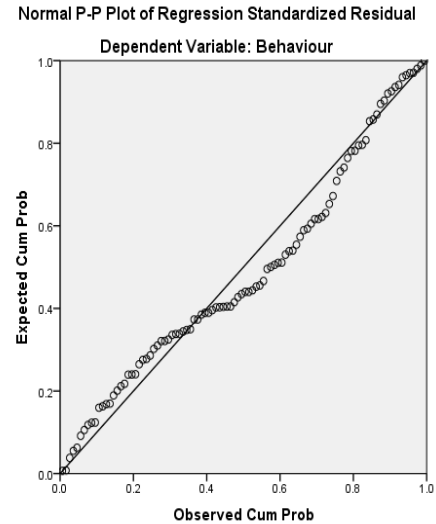
	x1
N	100
<i>Normal Parameters</i>	
Mean	3.37
Std Deviation	9.80
Absolute	.168
<i>Most Extreme Differences</i>	
Positive	.150
Negative	-.168
Kolmogorov-Smirnov Z	9.80
Asymp. Sig	0.87

a. Test distribution is Normal, b. Calculated from data
Sumber: Data Primer- Diolah

Tabel 11 menunjukkan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang terdistribusi normal jika diatas 0,05. Data terdistribusi normal karena Sig-tailed 0,980 > 0,05. Hal ini memberikan informasi bahwa penelitian dapat diterima.

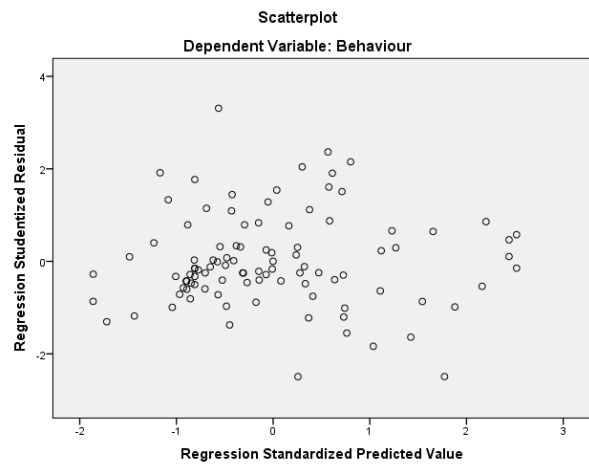


Gambar 2. Histogram Standarized Residual
Sumber: Data Primer- Diolah



Gambar 3. Normal P-Plot Of Resgression Standarized Residual
Sumber: Data Primer- Diolah

Gambar 2 dan 3 menjelaskan mengenai histogram dan P-Plot standarized residual bahwa data terdistribusi normal.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot
Sumber: Data Primer- Diolah

Koefisien Determinasi

Tabel 12 menjelaskan nilai R yaitu 0,399 atau 39,9% yang berarti tingkat keeratan sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi, niat dan Behaviour Wajib Pajak Pribadi berdasarkan Theory of Planned Behaviour tinggi karena menurut Sugiyono (2010) bila angka R > 39% atau 0,3999

maka hubungan variabel dependen dan variabel independen tinggi.

Tabel 12
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std. Error of The Estimate
1	.668	.446	.423	5.792

a. Predictors: (Constant), Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsi, Niat

b. Dependent Variable: Behaviour

Sumber: Data Primer- Diolah

Uji Hipotesis

Tabel 13
Hasil Uji Parsial

Model	B	Std.Err	Beta	t	Sig.	Hypoteses
(Constant)	27.104	8.743		3.100	.003	
Sikap	.397	.104	.350	3.830	.000	Diterima
Norma	-.195	.172	-.004	-1.133	.004	Diterima
Kontrol	.418	.144	.406	2.896	.001	Diterima
Niat	.184	.163	.134	1.128	.001	

Dependent Variable: Behaviour

Sumber: Data Primer- Diolah

Tabel diatas merupakan hasil uji T yang menyatakan bahwa :

1. Variabel sikap terhadap perilaku memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 yakni < 0,05. Maka hipotesis yang berbunyi “Sikap terhadap perilaku berpengaruh terhadap *Behaviour* kepatuhan membayar pajak”. Hasil ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya di berbagai negara yaitu Richardson (2006), Cummings et al. (2009), Langham (2012), Devos (2013) dan Alabede et al. (2011).
2. Variabel norma subjektif terhadap perilaku memiliki nilai signifikansi sebesar 0,04 yakni <0,05. Maka hipotesis yang berbunyi “Norma subjektif berpengaruh terhadap *Behaviour* kepatuhan membayar pajak.”. Hasil ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Taing & Chang (2020).
3. Variabel kontrol perilaku persepsi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,01 yakni <0,05. Maka hipotesis yang berbunyi “Kontrol perilaku persepsi berpengaruh terhadap *Behaviour* kepatuhan membayar pajak”. Hasil ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Taing & Chang (2020) dan Sutrisno et al. (2018).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Faktor-Faktor *Theory Planned Of Behaviour (TPB)* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari 3 aspek-aspek yang berada dalam TPB yaitu Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Persepsi. Penelitian ini berdasarkan data primer dan diukur dengan analisis regresi linier. Penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa variabel sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku persepsi adalah variabel yang memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa perlunya kesadaran kepatuhan wajib pajak sehingga pemasukan terhadap pembayaran pajak dapat meningkat dan lebih baik. Kepatuhan wajib pajak masih terbatas mengenai tindakan individual (internal) bukan dari faktor eksternal, sehingga untuk meningkatkan pendapatan pajak tidak bisa hanya meyakinkan saja, tetapi harus dilakukan bukti bahwa pajak yang dibayar bermanfaat untuk kepentingan rakyat, *trust* semakin meningkat yang menyebabkan kesadaran membayar pajak meningkat, khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun dana pajak dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat dibeikan saran yaitu:

1. Harus ditanamkan kesadaran bahwa perilaku wajib pajak itu sendiri yang sangat mempengaruhi kemauan membayar pajak.
2. Peningkatan kualitas oleh petugas pelayanan pajak dapat menjadi poin penting untuk mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak.
3. Penggunaan sampel dengan teori kuisioner dapat diperbanyak dengan rentang waktu yang lebih lama, menambahkan variabel intervening sehingga dapat diukur melalui model SEM, penelitian tidak terbatas hanya 1 KPP saja tetapi KPP cabang lain juga diteliti.

Acknowledgement

Terimakasih kepada almamater Universitas Sriwijaya (S1) dan KPP Palembang Ilir Barat.

References

Ajzen (2006). The theory of planned behavior. Retrieved January, 09, 2011. from: <http://people.umass.edu/ajzen/tpb.html>. diakses 18 Mei 2020.

- Alabede, J. O., Ariffin, Z. Z., & Idris, K. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. *Taxation*, 3(5), 91–104. <http://www.academicjournals.org/JAT>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Devos, K. (2013). *Factors influencing individual taxpayer compliance behavior*. Dordrecht, Netherlands: Springer Science & Business Media
- Hamdah et al. (2020). The Effect of Attitude, Subjective Norm, and Perceived Behavior Control of Taxpayer Compliance of Private Person in Tax Office Garut, Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 9, Supplementary Issue 1. ISSN: 2304-1013 (Online); 2304-1269 (CDROM); 2414-6722 (Print).
- Hung et al. (2006). Determinants of user acceptance of the e-Government services: The case of online tax filing and payment system. *Government Information Quarterly* 23 (2006) 97–122. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.005>
- Kiconco et al. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime* Vol. 26 No. 4, 2019 pp. 1117-1132. Emerald Publishing Limited 1359-0790 <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0031>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Langham (2012). Improving tax compliance strategies: Can the theory of planned behaviour predict business compliance?. *eJournal of Tax Research* (2012) vol. 10, no. 2, pp. 364-402
- Mustikasari, E. (2008). *Behavior Factors and Organizational Environments that Affect Noncompliance with Tax Professionals in Implementing Tax Liabilities in Processing Industry Companies in Surabaya* (Dissertation). Post Graduate Program in Airlangga University.
- Ramayah, T., Yusliza, M.Y., Norzalila, J. and Amlus, I. (2009), "Applying the theory of planned behaviour (TPB) to predict internet tax filing intentions", *International Journal of Management*, Vol. 26 No. 2, pp. 272-284. https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-981-10-8956-5_9
- Richardson, G. (2006), "The impact of tax fairness dimensions on tax compliance behavior in an Asian jurisdiction: the case of Hong Kong", *International Tax Journal* Winter, Vol. 32 No. 29.
- Sutrisno et al. (2018). Determinants of tax compliance: theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395-407. doi:10.21511/ppm.16(4).2018.33
- Taing & Chang (2020): Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior, *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tarjo, & Kusumawati (2006). Analysis of Personal Taxpayer's Behavior on the Implementation of a Self-Assessment System. *Journal of Accounting and Auditing Indonesian*, 10(1), 101-120.
- Widodo, A. & Austin, M. (2015). *Sunset Policy: Fostering, Aware and Increase. Observation and Research of Taxation*.